

PENTINGNYA DANA PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL

Subiyanto

Dosen Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Muh. Magelang

Abstract

Education funding is crucial to improving the quality of national education. Factors play a role determining the success of education funding. Due to insufficient funds (1) facilities, infrastructure, media, learning tools, can be met, (2) the learning process can be carried out more incentive, because educators are more focused they are not looking outside the sideline, and (3) motivation and enthusiasm of personnel working to increase education, they are ready also to improve the profession.

Conversely, if education funding is inadequate, resulting in "ketersendatan" and "inequality" in fulfillment of facilities and infrastructure, the welfare of teachers or lecturers, the level of administrative, academic and administrative services was not optimal, and the lack of passion for the professional development of teachers or lecturers and staff administrsi. This resulted in the education world work ethic is not optimal and unprofessional.

Conditions and circumstances are not conducive educational institutions and professionals will not produce human resources of low quality and economic value rendah. Dalam this context that the role of the fund is one very important factor in education as an institution that requires the workings of professionalism.

Keywords: *Improving Quality of Education.*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini ekonomi memainkan peranan penting. Hal ini ditunjukkan munculnya kecenderungan-kecenderungan manusia yang lebih mengutamakan kesejahteraan materi dari pada kesejahteraan rohani. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yang berkenbang ditengah masyarakat akhir-akhir ini. Adapun indikator-indikator yang dimaksud sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penghormatan yang diberikan kepada seseorang lebih ditentukan karena faktor perilaku atau kepribadian.
2. Kerja seseorang tidak dilihat dari prosesnya, tetapi dilihat dari hasilnya. Apakah dalam prosesnya curang, menipu, atau korupsi, yang penting hasilnya banyak.
3. Keberhasilan seseorang lebih banyak diukur secara fisik yakni tingkat ekonomi yang telah dicapai (diraih), tetapi bukan karena kematangan diri, kematangan penalaran, dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu di tengah masyarakat muncul anggapan umum yang menyatakan "apakah artinya sekolah tinggi, bila tidak dapat dijadikan sarana mencari atau mendapatkan uang yang banyak".

4. Nilai-nilai atau ukuran-ukuran moral mengalami degradasi (penurunan). Hal ini ditunjukkan munculnya istilah-istilah ditengah masyarakat yang bernada satire (sindiran), seperti "jujur hancur" dan "mencari rejeki yang haram saja susah, apalagi yang halal". Istilah tersebut mencerminkan mentalitas masyarakat.

Indikator-indikator tersebut di atas memperjelas dan mempertegas bahwa ekonomi memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini menyadarkan kita bahwa segala kegiatan manusia tidak dapat lepas dari masalah ekonomi, tanpa terkecuali kegiatan manusia dalam dunia pendidikan sebagai sebuah dunia yang otonom dalam pengelolaan sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan administrasi serta siswa, tidak dapat melepaskan diri dari masalah ekonomi. Untuk menjalankan roda pendidikan membutuhkan anggaran atau biaya tidak sedikit.

Analog dengan kehidupan keluarga, tingkat kehidupan sekolah atau perguruan tinggi pun sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya masing-masing. Sekolah atau perguruan tinggi yang kaya akan bisa hidup lebih leluasa, karena sarana jenis pembiayaan

dapat diberi dana sebagaimana mestinya. Malah ada sekolah yang memiliki sisa dana yang disimpan di bank agar mendapat bunga sebagai dana tambahan. Sebaliknya sekolah atau perguruan tinggi yang miskin sangat sulit bergerak, menggaji dosen saja masih sulit, apalagi membuat gedung atau membeli perlengkapan belajar yang canggih sangat tidak mungkin dilaksanakan. (Sidarta, 1997 : 234).

B. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Secara mendasar pendidikan nasional perlu memiliki karakteristik (1) mampu mengembangkan kreatifitas, kebudayaan, dan peradaban (2) mendukung deseminasi nilai keunggulan, (3) mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan, dan mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral. Sedangkan secara umum pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan (1) kepribadian kuat, religius, dan menjunjung tinggi budaya luhur bangsa (2) kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, (3) kesadaran moral hukum yang tinggi, dan (4) kehidupan yang makmur dan sejahtera (Jalal dkk, 2001 : 7 dan 67).

Dalam landasan filosofi dan tujuan pendidikan

nasional tersebut di atas, menunjukkan bahwa pendidikan itu menggarap sumber daya manusia (SDM) agar memiliki keunggulan dalam etos kerja tinggi, produktif, jujur, cerdas dan bermoral. Menurut Ekosusilo (2001 : 4) bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas melalui penguasaan, pengetahuan, ketrampilan dan nilai. Sedangkan Pidarta (1997 : 233) menandakan tujuan pendidikan adalah membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja dan hasil kerja yang sempurna. Tidak menolak pekerjaan kasar, menyadari akan kehidupan yang kurang beruntung dan mampu hidup dalam keadaan apapun.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan di atas jelas tidak mudah. Terutama yang berhubungan dengan sarana dan prasarana serta biaya dana pendidikan nasional?

C. DANA PENDIDIKAN NASIONAL

Menurut hasil penelitian Mc Mohan bersama Asian Development Bank (ADB) tahun 2000 menyatakan bahwa dana pendidikan Indonesia yang wajar adalah sebesar Rp 83,7 Trilyun (Kompas, 2001, hal 9).

Mengenai alokasi dana pendidikan Indonesia yang dilakukan oleh Mc Mohan dan ADB terperinci pada tabel di bawah ini.

KEBUTUHAN YANG WAJAR	
UNTUK DANA PENDIDIKAN YANG BERMUTU (BERDASARKAN STUDI MC MOHAN DAN ADB)	
JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH (Rp Trilyun)
Biaya operasional untuk pendidikan yang bermutu	76,7
-28,4 juta siswa SD / MI (Rp. 1,3 juta / siswa / tahun)	36,9
-9,4 juta SLTP / Mts (1,4 x Rp. 1,3 juta = Rp. 1,8 juta / siswa / tahun)	16,9
-5,3 juta SMU / SMK / MA (2 x Rp. 1,3 juta = Rp. 2,6 juta / siswa / tahun)	13,8
-1,3 juta Mahasiswa PTN (Rp. 7 juta / Mahasiswa / tahun)	9,1
-Rehabilitasi SD / MI	3,0
-Perluasan akses	2,5
-Wajar 9 tahun	2,0
-SLTA	0,5
PLS, Pemuda, dan Olah raga	0,5
Inovasi Broad Based Education	0,5
Pusat dan lain-lain	0,5
JUMLAH	83,7

Sumber : Kompas, 6 November 2001 hal. 9

Bagaimana dana pendidikan Indonesia? Apakah besarnya sesuai dengan hasil penelitian Mc Mohan dan ADB? Ternyata tidak dana pendidikan tahun 2002 hanya sebesar Rp. 13,9 Trilyun, sehingga untuk mencapai dana pendidikan yang wajar menurut sudi Mc Mohan dan ADB, masih kurang Rp.69,8 Trilyun.

Kekurangan dana pendidikan nasional sebesar Rp. 69,8 Trilyun, menurut Departemen Pendidikan Nasional, akan diambilkan dari dana alokasi umum (DAU) tahun 2002 sebesar Rp. 27 Trilyun (dari Rp. 67 Trilyun) dan dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp 10 Trilyun.

Meskipun begitu, dua sumber tambahan tersebut belum mampu menutupi kekurangan sebesar Rp 32,8 Trilyun. Oleh karena itu pihak pemerintah sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan.

Namun harapan pemerintah tersebut sulit terealisasi, karena kenyataannya untuk membayar gaji pegawai (Kompas, 2001,hal 9), dan penghasilan masyarakat Indonesia masih rendah, karenanya sangat mustahil untuk dapat berperperan aktif dalam pembiayaan pendidikan. Sedangkan harapan terakhir terletak pada kemauan dan kemampuan pemerintah daerah masing-masing untuk memprioritaskan pemenuhan dana pendidikan. Akan tetapi pemerintah daerah sendiri pada umumnya masih kesulitan menggali dan mengumpulkan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dana nasional masih mengalami kekurangan yang sangat besar.

D. DAMPAK NEGATIF AKIBAT KURANG-NYANYA DANA PENDIDIKAN

Pada bagian “Dana Pendidikan Nasional” dinyatakan dana pendidikan nasional mengalami kekurangan cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa dana pendidikan nasional belum memenuhi standar dana pendidikan bermutu, sebagaimana hasil studi Mc.Mohan dan ADB. Kekurangan dana tersebut berdampak negatif dalam proses pendidikan nasional. Memang dalam dunia pendidikan, faktor dana bukan sebagai pemegang peran utama, melainkan sebagai pemeran yang cukup menentukan keberhasilan pendidikan. Karena dengan ekonomi yang memadai, (1) Prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya bisa dipenuhi, (2) Proses belajar mengajar bisa dilaksanakan secara intensif, sebab para pendidik lebih dapat memusatkan perhatiannya, mereka tidak mencari sambilan di luar,

dan (3) motivasi dan kagairahan kerja personalia pendidikan meningkat, mereka siap pula untuk meningkatkan profesi (Pidarta, 197 :261).

Apabila dana pendidikan tidak memenuhi standar sebagaimana hasil “ketersendatan” Mc Mohan dan ADB, berarti ketiga hal tersebut di atas tidak dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Terjadilah “ketersendatan” dan “ketimpangan” dalam hal pemenuhan prasarana dan sarana tingkat kesejahteraan guru atau Dosen dan staf administrasi, pelayanan akademik dan administratif tidak optimal, dan tidak adanya gairah pengembangan profesi bagi dosen dan tenaga administrasi sehingga etos kerja dunia pendidikan tidak meksimal dan tidak profesional.

Berhubung kondisi dan situasi lembaga pendidikan tidak kondusif dan tidak profesional, akan mempengaruhi “perspektif investasi sumberdaya manusia” (human capital) yang dihasilkan, yakni “Tidak bermutu”. Karena SDM yang dihasilkan tidak memiliki tingkat kemampuan, ketrampilan, pengetahuan dan etos kerjanya tidak memadai, sehingga nilai ekonomisnya berkurang. Menurut Ekosusilo (2001 : 9) bentuk-bentuk produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan berupa quantity of produk, produk mix, participation Indonesia the labour force, allocative ability ang job satisfaction, tidak akan tercapai.

Sedangkan pendidikan yang menurut Sriningsih Satmoko (2000 : 206) dinyatakan menduduki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik social, spiritual, intelektual, maupun kemampuan profesionalnya dalam upaya menjangkau kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat, terasa sangat suli diwujudkan, karena lembaga yang menangani (yakni lembaga pendidikan) tidak kondusif dan tidak profesional sehubungan dengan “ketidakberdayaan kinerja lembaga pendidikan” akibat kurangnya dana (biaya pendidikan tidak mencukupi).

Begitu juga misi penting pendidikan, yakni memberi pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada anak didik, atau mengembangkan SDM dan menciptakan angkatan kerja Indonesia yang tangguh, mampu dan siap kerja sehingga dapat mengisi semua jenis, tingkat lapangan kerja dalam pembangunan nasional (Tirtarahardja, 2000 : 36), mustahil dapat terealisasi, karena lembaga pendidikan tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mempersiapkan hal tersebut, sehubungan hal tersebut, sehubungan kekurangan dana pembiayaan pendidikan.

Uraian di atas semakin mempertegas bahwa faktor dana memegang peranan yang cukup menentukan keberhasilan mutu pendidikan nasional.

E. KESIMPULAN

Pembahasan Pentingnya dana Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Nasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana pendidikan nasional tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan wajar bagi pendidikan bermutu.
2. Kekurangan dana pendidikan akan mengakibatkan “ketersendatan” dan

“ketimpangan” dalam pemenuhan prasarana dan sarana, tingkat kesejahteraan guru atau dosen dan administrasi pelayanan akademik dan administratif tidak optimal dan tidak adanya gairah pengembangan profesi bagi dosen dan administrasi.

3. Ketiga, kondisi dan situasi lembaga pendidikan yang tidak kondusif dan tidak profesional akan menghasilkan SDM yang kurang bermutu dan nilai ekonomisnya rendah.
4. Faktor ekonomi memegang peranan cukup penting menentukan keberhasilan atau mutu pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fasli jalal dkk. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicita
- Madyo Ekosusilo. 2001. Pendidikan, Produktifitas, dan Pertumbuhan ekonomi. Seminar Regional tentang “Peranan Pendidikan dalam Meningkatkan Ekonomi” di Univet Bantara Sukoharjo, 12 Mei 2001.
- Madyo Ekosusilo dkk. 1988. Dasar-dasar Pendidikan. Semarang : Effhar Publishing.
- I Made Pidarta. 1997. Landasan Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta
- Nanang Fattah. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung : Rosda.
- Ngalim Purwanto. 1998. Administrasi dan Supervisi Pendidikan Semarang: IKIP Semarang Press. Umar Tritarahardja dkk. 2000. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harian Kompas No.130. hal IX November 2001.